



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

Sambutan Pembukaan

**Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden**

Pada Acara Webinar

**Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif
Daerah (DID) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2022 untuk Percepatan Penurunan *Stunting***

Jakarta, 24 Mei 2021

Yang saya hormati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati

Yang saya hormati, Kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo

Yang saya hormati, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Bapak Astera Primanto Bhakti

Yang saya hormati, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Bapak Subandi Sardjoko

Yang Saya hormati, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Ibu Harry Nur Cahya Murni

Yang saya hormati, Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Ibu Kartini Rustandi

Yang saya hormati, Bapak dan Ibu narasumber, para Bupati/Walikota, para Kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh peserta webinar.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua kenikmatan dan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dalam acara webinar ini yang akan membahas tentang Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.

Selanjutnya, saat ini kita masih dalam bulan Syawal, oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan Selamat Idul Fitri kepada Bapak dan Ibu yang merayakannya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala menerima amal ibadah kita semua selama Bulan Ramadhan, mohon maaf lahir dan batin.

Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia,

Sejak tahun 2018 Pemerintah melaksanakan Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Program ini dilakukan karena kita masih menghadapi persoalan terkait dengan gizi masyarakat, terutama *stunting* atau kekurangan gizi kronis pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar umurnya. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* pada balita saat itu adalah 30,8%.

Masalah *stunting* ini tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2018, hanya 1 provinsi yaitu DKI Jakarta dan 34 kabupaten/kota yang prevalensinya di bawah 20%. Sisanya, masih mempunyai prevalensi di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%.

Dengan mempertimbangkan dampak *stunting* bagi masa depan bangsa, kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pada tahun 2018 Pemerintah menyusun Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2018 – 2024 (*Stranas Stunting*). *Stranas* ini menjadi acuan bagi semua pihak untuk melaksanakan percepatan penurunan *stunting*, dengan target menurunkan hingga 14% pada tahun 2024.

Stranas Stunting telah menetapkan 5 pilar utama percepatan penurunan *stunting*, yaitu (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional; (2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; (3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa; (4) Ketahanan Pangan dan Gizi; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi.

Stranas juga sudah mengidentifikasi kelompok sasaran prioritas dan penting dalam program ini, yaitu keluarga yang mempunyai Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan anak dibawah usia 2 tahun atau Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stranas* juga menetapkan remaja putri dan anak balita sebagai sasaran untuk diintervensi, selain juga menetapkan intervensi prioritas yang diperlukan, melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Pada pelaksanaannya, program ini sudah dan akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan 8 Kabupaten/Kota percontohan pada tahun 2017, kemudian 100 Kabupaten/Kota pada tahun 2018; 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019; 260 kabupaten/kota pada tahun 2020 dan tahun ini mencakup 360 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas. Tahun depan, yaitu tahun 2022, seluruh 514 kabupaten/kota diminta untuk melaksanakan program percepatan penurunan *stunting* di daerahnya masing-masing.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Setelah 3 tahun pelaksanaan program, kemajuan dalam percepatan penurunan *stunting* mulai terlihat. Prevalensi *stunting* pada balita mengalami penurunan dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,67% pada tahun 2019. Demikian juga Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) yang menunjukkan adanya kenaikan indeks sebesar 2,16 poin dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Jumlah provinsi yang mempunyai prevalensi di bawah 20% bertambah menjadi 4 provinsi. Begitu pula kabupaten/kota yang mempunyai prevalensi di bawah 20% jumlahnya bertambah. Dari sisi cakupan intervensi, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan KL lainnya, cakupan intervensi spesifik juga mengalami perbaikan dari tahun 2018 ke tahun 2020, dan begitu pula cakupan intervensi sensitif.

Namun demikian, dengan terjadinya pandemi Covid 19 yang sejak Maret 2020, berbagai program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik, mempengaruhi upaya pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2020, dimana hampir semua sumberdaya difokuskan untuk menghadapi pandemi Covid 19. Upaya penurunan *stunting* sangat terdampak diantaranya karena adanya tuntutan untuk melakukan karantina wilayah dan *physical distancing*. Angka kemiskinan juga mengalami kenaikan menjadi kembali di atas 10%, yang mempengaruhi daya beli masyarakat, termasuk terhadap pangan bergizi bagi ibu hamil dan anak balita.

Oleh karenanya, pandemi Covid 19 ini menjadi tantangan baru buat kita semua untuk tetap berkomitmen melanjutkan program percepatan penurunan *stunting*, dengan target 14% pada tahun 2024 dalam kondisi disrupsi Covid-19 sebagai sebuah tantangan besar. Namun, arahan Presiden dan amanat Wakil Presiden tetap menegaskan bahwa meskipun menghadapi Covid-19, percepatan penurunan *stunting* tetap harus dilakukan dan diprioritaskan.

Komitmen Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan percepatan penurunan *stunting* ini tentu saja harus diikuti oleh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kelurahan/Desa. Dengan komitmen yang tinggi dari para pemimpin daerah, maka sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan percepatan penurunan *stunting* dapat dilakukan, melalui koordinasi dan konvergensi program yang terus didorong oleh pemimpin daerah.

Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini Sekretariat Wakil Presiden menyampaikan terima kasih kepada 360 Bupati dan Walikota yang telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan *stunting* di daerahnya.

Untuk 154 Kepala Daerah yang menjadi lokasi prioritas pada tahun 2022, kami berharap agar Bapak dan Ibu juga mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*. Dalam beberapa waktu ke depan, Setwapres akan mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendeklarasikan komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan *stunting*. Saya juga meminta agar bapak dan Ibu mulai menyiapkan rencana kerja dan anggaran untuk percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2022 mendatang.

Bapak dan Ibu Hadirin yang Saya hormati,

Pemerintah telah memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*. Dari sisi pendanaan, Pemerintah mengalokasi dana melalui berbagai mekanisme, baik itu melalui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pemerintah juga menggalang kemitraan dengan pihak dunia usaha, mitra pembangunan, universitas, lembaga swadaya masyarakat dan mitra lainnya untuk mendukung program penurunan *stunting* ini.

Untuk alokasi anggaran Kementerian/Lembaga, pada tahun 2020 Pemerintah telah mengalokasikan Rp. 39 triliun yang tersebar di

20 Kementerian/Lembaga yang mempunyai program terkait stunting, yang dilanjutkan pada tahun 2021 sebesar Rp32,5 triliun.

Sementara itu, untuk Dana TKDD, sejak tahun 2019 Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung percepatan penurunan stunting, baik itu DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Untuk DAK Fisik, beberapa bidang yang terkait dengan stunting diantaranya adalah DAK Kesehatan, DAK Sanitasi dan Air Minum, serta DAK Lingkungan Hidup. Sementara untuk DAK Non Fisik, beberapa bidang yang terkait adalah DAK Kesehatan, DAK Keluarga Berencana, dan DAK Pendidikan Anak Usia Dini. Pemerintah juga menyediakan DAK non Fisik khusus untuk mendukung konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah, melalui BOK Kesehatan.

Namun, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait dengan pemanfaatan DAK ini, diketahui bahwa banyak daerah yang belum memanfaatkannya secara optimal untuk stunting. Untuk DAK Fisik, beberapa daerah tidak menyampaikan usulan, bahkan daerah yang sudah mengusulkanpun, seringkali tidak dapat merealisasikan secara optimal.

Sementara itu untuk DAK Non Fisik yang secara khusus disediakan untuk mendukung konvergensi penurunan stunting, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ternyata di banyak daerah pemanfaatannya hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, meskipun dana BOK Kesehatan seharusnya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan konvergensi lintas OPD terkait stunting. Oleh karena itu, melalui forum ini saya meminta agar Pemerintah Daerah dapat betul-betul memanfaatkan alokasi DAK yang sudah disediakan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*.

Selain DAK, Pemerintah juga menjadikan percepatan Penurunan *stunting* sebagai salah satu indikator dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Ini tentu saja seharusnya menjadi motivasi

bagi setiap daerah untuk dapat menunjukkan kinerjanya dalam melakukan percepatan penurunan *stunting*.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sebagaimana dimaklumi bersama, saat ini rancangan Peraturan Presiden yang memayungi tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* beserta kelembagaannya sedang dalam tahap finalisasi, yang apabila akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program di tingkat pusat hingga ke daerah.

Penunjukan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana dimaksudkan untuk menguatkan pelaksanaan program yang selama ini sudah berjalan, dengan tetap berpedoman pada strategi nasional percepatan pencegahan *stunting*, sehingga kegiatan untuk menurunkan *stunting* betul-betul sampai di kelompok sasaran. Ini artinya, program dan kegiatan yang selama ini sudah dilakukan akan terus dilanjutkan dan dilengkapi program baru yang ditujukan untuk menguatkan program yang sudah berjalan di lapangan.

Penunjukan ini tidak menghilangkan peran dari Kementerian dan Lembaga lain. Kementerian Kesehatan tetap bertanggungjawab dalam intervensi spesifik; serta peranan dan tanggung jawab dalam intervensi sensitive oleh Kementerian PUPR melalui penyediaan sarana sanitasi, air minum, sampah dan limbah; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Kementerian Sosial melalui program bantuan pangan; serta Kementerian/Lembaga lainnya tetap diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam konvergensi percepatan penurunan *stunting* di tingkat Pusat. Sementara di tingkat daerah, Koordinasi yang bersifat lintas sektor akan terus didorong. Kemendagri akan terus melaksanakan pendampingan kepada daerah dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* termasuk melakukan pemantauan dan evaluasinya.

Sebagai acuan detail dalam pelaksanaan program ke depan, Rancangan Perpres telah mengamanatkan BKKBN untuk menyusun Rencana Aksi Nasional, yang akan menjadi acuan bersama dalam penguatan implementasi program ke depan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Acara webinar ini dilaksanakan untuk sosialisasi arah kebijakan dan proses pengusulan DAK, DID, dan APBD Tahun 2022 untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* kepada seluruh kabupaten/kota, terutama 154 kabupaten/kota yang baru ditetapkan Menteri Bappenas menjadi lokasi prioritas tahun 2022. Sehingga kegiatan ini diperlukan agar Pemda mengetahui dan dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang telah disediakan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*

Akhirnya, dengan mengucap *bismillaahirrahmaanirrahiim*, acara Webinar “Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan APBD Tahun 2022 untuk Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*”, Saya nyatakan dibuka.

Terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta. Semoga Allah SWT, Tuhan YME, meridhoi kita. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

***Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pembangunan
Manusia dan Pemerataan
Pembangunan, Sekretariat
Wakil Presiden***

Dr. Suprayoga Hadi